

BAGIAN ANGGARAN 032



LAPORAN KEUANGAN

SATKER BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUNAN *AUDITED*
TAHUN ANGGARAN 2024

JALAN HUSEIN HAMZAH NOMOR 01 PALLIMA PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT
Telp. (0561) 766691, email : bpslpontianak@gmail.com
<http://bpslpontianak.kkp.go.id/>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, Mei 2025
Kepala Balai,

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si
NIP. 19740513 200901 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. Lampiran dan Daftar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Mei 2025

Kepala Balai,



Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si
NIP. 19740513 200901 1 004

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak Unaudited Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 3) PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 4) PMK Nomor 173 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

dan berdasarkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Laporan Realisasi Anggaran adalah Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2,421,607,418 atau mencapai 121,08 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 2,000,000,000.

Realisasi Belanja Negara pada Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 18,739,996,019 atau mencapai 98,59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 19,008,625,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 21,906,291,502 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2,910,400; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 21,906,291,502; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing – masing sebesar Rp 20,149,746 dan Rp 21,886,141,756.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2409,841,914 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 18,837,950,227 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 16,428,108,313. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 26,265,504 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 16,401,842,809.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp 21,984,095,964 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (16,401,842,809) kemudian dikurangi dengan koreksi – koreksi senilai Rp (14,500,000) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 16,318,388,601 juga dikurangi kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp 97,954,208 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 21,886,141,756.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan -

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		2,000,000,000	2,421,607,418	121	2,385,022,383
JUMLAH PENDAPATAN		2,000,000,000	2,421,607,418	121	2,385,022,383
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai		6,707,512,000	6,629,118,081	99	5,559,408,235
Belanja Barang		11,435,981,000	11,246,647,116	98	7,698,330,866
Belanja Modal		865,132,000	864,230,822	100	921,853,875
JUMLAH BELANJA		19,008,625,000	18,739,996,019	99	14,179,592,976

II. NERACA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK NERACA

PER 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Belanja dibayar di Muka (prepaid)		-	164,754,167
Piutang Bukan Pajak		-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		-	-
Persediaan		2,910,400	1,625,400
JUMLAH ASET LANCAR		2,910,400	166,379,567
ASET TETAP			
Tanah		16,176,340,000	16,176,340,000
Peralatan dan Mesin		7,549,546,769	6,853,575,947
Gedung dan Bangunan		4,221,848,220	4,053,588,220
Jalan. Irigasi dan Jaringan		690,656,250	690,656,250
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	14,500,000
Akumulasi Penyusutan	-	6,735,010,137	- 5,949,092,097
JUMLAH ASET TETAP		21,903,381,102	21,839,568,320
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain		-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		21,906,291,502	22,005,947,887
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga		20,149,746	21,851,923
Utang Yang Belum Ditagihkan		-	-
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		20,149,746	21,851,923
JUMLAH KEWAJIBAN		20,149,746	21,851,923
EKUITAS			
Ekuitas		21,886,141,756	21,984,095,964
JUMLAH EKUITAS		21,886,141,756	21,984,095,964
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21,906,291,502	22,005,947,887

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2,409,841,914	2,378,434,258
JUMLAH PENDAPATAN		2,409,841,914	2,378,434,258
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,629,118,081	5,559,408,235
Beban Persediaan	D.3	93,824,946	76,762,532
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,709,257,917	3,128,652,999
Beban Pemeliharaan	D.5	273,244,791	361,406,524
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6,133,951,452	3,751,601,350
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	212,635,000	294,358,438
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	785,918,040	663,888,506
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		18,837,950,227	13,836,078,584
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16,428,108,313)	(11,457,644,326)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	5,138,000
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		26,265,504	1,450,125
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		26,265,504	6,588,125
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16,401,842,809)	(11,451,056,201)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(16,401,842,809)	(11,451,056,201)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	21,984,095,964	21,632,589,572
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16,401,842,809)	(11,451,056,201)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI	E.3	(14,500,000)	7,992,000
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
LAIN-LAIN			-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	(14,500,000)	7,992,000
KOREKSI LAIN-LAIN	E.8	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		16,318,388,601	11,794,570,593
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		97,954,208	351,506,392
EKUITAS AKHIR	E.9	21,886,141,756	21,984,095,964

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Istimewa Pontianak

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau – pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor [PER.22/MEN/2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak diresmikan pada tanggal 27 Januari 2009 yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau – pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI adalah Sistem Akuntansi Terintegrasi. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan BMN dan Laporan Persediaan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan – kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain – Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang

jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain – lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos – pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua. Keterbandingan penyajian akun – akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2019 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp 19,008,625,000 dengan rincian sumber dana sebagai berikut :

Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 15,918,625,000.

PNBP sebesar Rp 3,090,000,000.

*Realisasi
Pendapatan Rp
2,421,607,418*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2,421,607,418 atau mencapai 121 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 2,000,000,000. Pendapatan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Pontianak terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,166,673
Pendapatan Perizinan Lainnya	1,085,805,000	1,219,455,000
Pengembalian Pendapatan Perizinan Lainnya	0	-
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	914,195,000	1,187,220,241
Pengembalian Pendapatan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,765,504
Jumlah	2,000,000,000	2,421,607,418

Realisasi Pendapatan Periode Tahun Anggaran 2024 BPSPL Pontianak adalah :

- a) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas sebesar Rp 3,166,673.
- b) Pendapatan dari Jasa Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1,187,220,241 berupa pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.
- c) Pendapatan dari Pelayanan Perizinan Lainnya sebesar Rp 1,219,455,000 penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.
- d) Penerimaan kembali belanja barang TAYL adalah penerimaan atas belanja barang sebesar Rp 11,765,504 dari setoran mandiri atas tindak lanjut temuan audit inspektorat jenderal berupa temuan

perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, konsumsi rapat, penggandaan laporan dan langganan listrik mess.

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp

18,739,996,019

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 18,739,996,019 atau 98,59% dari anggaran belanja sebesar Rp 19,008,625,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6,707,512,000	6,630,599,459	98.85
Belanja Barang	11,435,981,000	11,259,558,116	98.46
Belanja Modal	865,132,000	864,230,822	99.90
Total Belanja Kotor	19,008,625,000	18,754,388,397	98.66
Pengembalian	-	14,392,378	-
Jumlah	19,008,625,000	18,739,996,019	98.59

Pengembalian adalah pengembalian atas belanja pegawai berupa pengembalian atas pembulatan gaji PNS senilai Rp 1,378 dan pengembalian atas tunjangan umum PNS senilai Rp 1,480,000. Semua pengembalian adalah bentukan langsung (otomatis) aplikasi gaji PPABP, setoran atau potongan langsung bersamaan dengan SPM. Terdapat pengembalian senilai Rp 12,911,000 adalah pengembalian perjalanan dinas biasa atas temuan inspektorat jenderal pada audit kinerja BPSPL Pontianak, pengembalian dilakukan dengan menyetorkan langsung ke rekening negara.

Belanja Pegawai

B.3 Belanja Pegawai

Rp

6,629,118,081

Realisasi Belanja Pegawai Periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6,629,118,081.

Rincian Belanja Pegawai

URAIAN	2024
Belanja Gaji, Tunjangan Gaji dan	3,106,815,617
Belanja Lembur	105,111,000
Belanja Tunj. Khusus	3,418,672,842
Jumlah Belanja Kotor	6,630,599,459
Pengembalian Belanja Pegawai	1,481,378
Jumlah Belanja	6,629,118,081

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BPSPL Pontianak memiliki total pegawai 49 orang dengan detail 45 orang PNS dan 4 orang PPPK.

1 orang PPPK pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Desember 2023.

3 orang PPPK pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Maret 2024.

Pengembalian belanja pegawai adalah pengembalian atas pembulatan gaji PNS senilai Rp 1,378 dan pengembalian atas tunjangan umum PNS senilai Rp 1,480,000. Semua pengembalian adalah bentukan langsung (otomatis) aplikasi gaji PPABP, setoran atau potongan langsung bersamaan dengan SPM.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp

11,246,647,116

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 11,246,647,116.

Rincian Belanja Barang

URAIAN	2024
Belanja Barang dan Jasa	4,546,205,927
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	95,109,946
Belanja Pemeliharaan	273,244,791
Belanja Perjalanan	6,146,862,452
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	198,135,000
Jumlah Belanja Kotor	11,259,558,116
Pengembalian Belanja	12,911,000
Jumlah Belanja	11,246,647,116

Belanja barang pada BPSPL Pontianak telah mencapai 98,34 persen. Pada realisasi belanja barang terdapat pengembalian belanja pada belanja perjalanan dinas. Pengembalian tersebut adalah hasil temuan audit oleh APIP, Inspektorat Jenderal KKP senilai Rp 12,911,000. Pengembalian dilakukan dengan menyetorkan langsung ke rekening negara.

Belanja Modal

Rp

864,230,822

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 864,230,822. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Realisasi Belanja Modal

URAIAN	2024
Belanja Modal Tanah	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	695,970,822
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168,260,000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Belanja Modal Lainnya	0
Jumlah Belanja Kotor	864,230,822
Pengembalian	0
Jumlah Belanja	864,230,822

Pada tahun anggaran 2024 terdapat penambahan nilai pada peralatan dan mesin dan juga gedung dan bangunan. Hal tersebut dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin berupa barang inventaris kantor, penambahan nilai aset gedung dan bangunan berupa ruang pelayanan.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak untuk periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 695,970,822.

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	695,970,822
Belanja Modal BLU	0
Jumlah Belanja Kotor	695,970,822
Pengembalian	0
Jumlah Belanja	695,970,822

Belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari pengadaan barang berupa Long Boat, Alat Ukur Arus Air, Meubelair, Barang Inventaris seperti laptop, smartphone, ipad dan Drone, AC, Televisi. Pengadaan tersebut digunakan lokasi wilker Mahakam Hulu dan Pontianak.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal untuk periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 168,260,000.

Belanja tersebut merupakan realisasi perencanaan dan pengawasan pelaksanaan renovasi ruang pelayanan kantor BPSPL Pontianak dan penambahan nilai gedung dan bangunan dari pelaksanaan renovasi ruang pelayanan kantor BPSPL Pontianak.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0. Nilai tersebut merupakan nilai pajak yang dibayarkan di bulan Oktober.

*Piutang PNB
Rp 0*

C.4 Piutang PNB

Terdapat Piutang PNB pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0. Nilai tersebut adalah nilai piutang pendapatan sewa bangunan dari sewa rumah dinas.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 .

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 .

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 .

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp 0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak ada Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 .

*Persediaan
Rp 2,910,400*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2,910,400.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Alat tulis	51.000
2	Ordner dan Map	175.000
3	Cutter	14.900
4	ATK Lainnya	899.500
5	Kertas HVS	1.770.000
Nilai Total		2.910.400

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan sudah di distribusi ke unit masing – masing.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak ada Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 .

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada Tagihan Penjualan Angsuran pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per Desember 2024 .

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 .

*Tanah
Rp
16,176,340,000*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp 16,176,340,000. Tidak ada penambahan atas nilai Aset tanah pada TA 2024. Tanah tersebut seluas 7.402 meter persegi berlokasi di Jalan Husein Hamzah Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

*Peralatan dan
Mesin*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah Rp 7,549,546,769. Terdapat

Rp
7,549,546,769

peningkatan nilai Peralatan dan Mesin dari 6,853,575,947 pada 2023 menjadi 7,549,546,769 per 31 Desember 2024 karena terdapat belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan Desember 2024 senilai Rp 695,970,822.

Gedung dan
Bangunan

Rp
4,221,848,220

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah Rp 4,221,848,220. Terdapat peningkatan nilai Gedung dan Bangunan dari Rp 4,053,588,220 pada 2023 menjadi 4,221,848,220 per 31 Desember 2024 karena terdapat belanja peningkatan nilai Gedung dan bangunan sampai dengan Desember 2024 senilai Rp 168,260,000.

Jalan.Jaringan
dan Irigasi

Rp690,656,250

C.17 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 690,656,250. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya

Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah Rp 0.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp
0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0.

Akumulasi
Penyusutan

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 Rp 6,735,010,137. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset

Aset Tetap Rp 6,735,010,137 tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7,250,732,269	5,649,884,407	1,600,847,862
2	Gedung dan Bangunan	4,053,588,220	658,129,739	3,395,458,481
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	690,656,250	426,995,991	263,660,259
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		11,994,976,739	6,735,010,137	5,259,966,602

Aset Tak Berwujud Rp 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024.

Aset Lain-Lain Rp 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain – lain per 31 Desember 2024 adalah Rp 0. Aset Lain – lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp 0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	0	0	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

*Uang Muka
dari KPPN Rp 0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
20,149,746*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 20,149,746. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp 20,149,746 yang terdiri tagihan listrik, telepon, air bulan desember 2024 yang masih harus dibayar.

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp 0*

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak ada Pendapatan yang Ditangguhkan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024.

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp 0*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp 0*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak ada Beban yang Masih Harus Dibayar pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024.

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp
0*

C.29 Utang Yang Belum Ditagihkan

Terdapat Utang Yang Belum Ditagihkan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0.

*Ekuitas
Rp
21,886,141,756*

C30. Ekuitas

Pada Laporan Keuangan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 21,886,141,756. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp

2,409,841,914

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2,409,841,914. Jumlah tersebut tidak sama dengan nilai pada LRA sebesar Rp 2,421,607,418, terdapat selisih sebesar Rp 11,765,504. Nilai selisih pendapatan tersebut karena terdapat pendapatan yang bersumber dari penerimaan kembali atas belanja barang tahun anggaran yang lalu. Pada Laporan Operasional, pendapatan adalah yang bersumber dari kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pendapatan	Pengembalian	Netto
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,166,673	0	3,166,673
2	Pendapatan Perizinan Lainnya	1,219,455,000	-	1,219,455,000
3	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,187,220,241	-	1,187,220,241
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	0	-
	Pendapatan LO	2,409,841,914	-	2,409,841,914

Beban Pegawai

Rp 6,629,118,081

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai tersaji pada Laporan Keuangan 31 Desember 2024 sebesar Rp 6,629,118,081.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

URAIAN	2024
Beban Gaji Pokok PNS	2,105,190,300
Beban Pembulatan Gaji PNS	32,965
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	123,739,710
Beban Tunj. Anak PNS	31,169,566
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000
Beban Tunj. Fungsional PNS	222,520,000
Beban Tunj. PPh PNS	13,629,950
Beban Tunj. Beras PNS	103,488,180
Beban Uang Makan PNS	218,139,000
Beban Tunjangan Umum PNS	49,345,000
Beban Gaji Pokok PPPK	160,180,000
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,496
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	8,329,360
Beban Tunj. Anak PPPK	1,665,872
Beban Tunj. Fungsional PPPK	14,040,000
Beban Tunj. Beras PPPK	7,386,840
Belanja Uang Makan PPPK	21,275,000
Beban Uang Lembur	103,855,000
Beban Uang Lembur PPPK	1,256,000
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,201,987,501
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	216,685,341
Jumlah Beban	6,629,118,081

Nilai pada LO sama dengan nilai pada LRA. Nilai pada LRA sebesar Rp 6,629,118,081.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan Rp
93,824,946*

Jumlah Beban Persediaan yang tersaji pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 93,824,946. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang – barang yang habis pakai, termasuk barang – barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Nilai beban persediaan berbeda dengan nilai pada LRA. Nilai pada LRA sebesar Rp

95,109,946. Terdapat selisih antara LO dan LRA sebesar Rp 1,285,000. Nilai tersebut adalah nilai mutasi tambah-kurang persediaan selama tahun 2024.

*Beban Barang
dan Jasa Rp
4,709,257,917*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Pada Laporan Keuangan jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4,709,257,917. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	2024
Beban Keperluan Perkantoran	340,687,399
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,962,800
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107,980,000
Beban Honor Operasional Lainnya	12,972,668
Beban Barang Operasional Lainnya - Pandemi Covid-19	0
Beban Bahan	1,251,841,931
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Beban Langganan Listrik	175,980,687
Beban Langganan Telepon	107,145,974
Beban Langganan Air	10,105,106
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	(7,992,000)
Beban Sewa	1,117,967,667
Beban Jasa Profesi	195,050,000
Beban Jasa Lainnya	1,380,563,685
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	7,992,000
Jumlah	4,709,257,917

Terdapat perbedaan nilai antara LO dengan LRA pada beban barang dan jasa. Nilai LRA pada beban barang dan jasa sebesar Rp 4,546,205,927. Selisih nilai sebesar Rp 163,051,990. Selisih tersebut adalah adalah nilai akumulasi dari selisih nilai antara langganan listrik, telepon, air dan sewa.

Beban

Pemeliharaan Rp
273,244,791

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 273,244,791. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Untuk beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dengan pilihan kode akun. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46,042,593
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	227,202,198
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	0
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	0
Jumlah	273,244,791

Beban pemeliharaan Gedung dan bangunan di Pontianak dilaksanakan perbaikan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal bukan menambah nilai aset. Tidak ada perbedaan nilai antara LO dengan LRA pada beban pemeliharaan.

Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Pontianak dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan, perbaikan peralatan dan mesin berupa personal computer, printer, genset, AC, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan inventaris kantor lainnya.

Beban

Perjalanan Dinas

Rp

6,133,951,452

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 6,133,951,452. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN JENIS BEBAN	2024
Beban Perjalanan Biasa	5,277,776,452
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	632,750,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46,750,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	156,675,000
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	20,000,000
Jumlah	6,133,951,452

Beban perjalanan dinas luar negeri sampai dengan 31 Desember 2024 adalah pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan Dean of Fujian Institute for Sustainable Oceans, Xiamen University di China atas nama 2 orang pegawai BPSPL Pontianak yaitu Dwi Listyaningsih dan Hetty P selama 7 hari sejak 7-15 Juli 2024.

Beban Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp 212,635,000

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp 212,635,000. Terdapat perbedaan nilai antara LO dengan LRA. Nilai pada LRA sebesar Rp 198,135,000. Selisih tersebut sebesar Rp 14,500,000. Merupakan nilai atas koreksi aset

KDP. Seluruh barang yang diserahkan kepada Masyarakat berupa peralatan dan mesin dengan rincian BAST sebagai berikut :

No	BAST	Nilai
1	B.1578/BPSPL.2/PRL.440/VI/2024	98,235,000
2	B.3260/BPSP.2/PRL.440/IX/2024	99,900,000
3	B.4037/BPSPL.2/PL.750/XI/2024	14,500,000
	Nilai Total	212,635,000

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2022 adalah masing – masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 785,918,040

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 sebesar Rp 785,918,040. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	639,189,187
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	91,297,973
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	48,873,778
Beban Penyusutan Irigasi	4,358,720
Beban Penyusutan Jaringan	2,198,382
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	785,918,040

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp -
26,265,504*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp 26,265,504. Rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN	2024
Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	11,765,504
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	14,500,000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	26,265,504

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. Tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
21,984,095,964*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 21,984,095,964.

*Defisit LO
Rp
(16,401,842,809)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Pada Laporan Keuangan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp (16,401,842,809). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Persediaan Aset
Tetap/Aset
Lainnya Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp
14,500,000*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp 14,500,000. Nilai ini adalah koreksi pencatatan modul aset tetap atas konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

*Transaksi Antar
Entitas Rp
16,318,388,601*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 16,318,388,601. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	18,739,996,019
Diterima dari Entitas Lain	(2,421,607,418)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	16,318,388,601

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang

melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024. DKEL sebesar Rp 18,739,996,019 sedangkan DDEL sebesar Rp - 2,421,607,418.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk dan Transfer Keluar per tanggal 31 Desember 2024 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah masing – masing sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas. barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Tidak ada Pengesahan Hibah Langsung maupun Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per tanggal 31 Desember 2024 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak.

*Ekuitas Akhir Rp
21,886,141,756*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 21,886,141,756.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada Kejadian Penting yang dialami Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak berdiri pada tahun 2009. Adapun Struktur Organisasi Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak TA. 2024 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran :

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen :

Eki Saputra Risja, S.E

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Anggun Nurlisa, S.St.Pi

Bendahara Pengeluaran :

Pramita Putri Utami

Bendahara Penerimaan :

M. Andry Wiratman, S.Pi

Operator Modul GLP :

Eki Saputra Risja, S.E

Operator Modul BMN :

Hendrikus Luat Maring

Operator Modul Persediaan :

Tiar Evi Yani

2. Pagu DIPA BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2024 bersumber dari 2 yaitu Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan 31 Desember 2024 data pagu anggaran dan

realisasi berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut :

Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi
Rupiah Murni	15,918,625,000	15,713,318,267 (98,71%)
PNBP	3,090,000,000	3,026,677,752 (97,95%)

3. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah dilaksanakan revisi sebanyak 22 kali. Penjelasan atas Revisi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah sebagai berikut :

1) Revisi ke-1 (23 Januari 2024)

Revisi Kewenangan DJA dalam rangka perubahan Volume Kegiatan pada RO Layanan BMN yang semula berjumlah 7 output Layanan menjadi 11 Layanan. Penambahan Layanan ini meliputi Layanan Pemindatanganan, Layanan Penghapusan, Layanan Penyusunan Laporan BMN dan Layanan Penyusunan RKBMN.

2) Revisi ke-2 POK (30 Januari 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka revisi Header detail Belanja Perjalanan Dinas pada semua akun Perjalanan Dinas (524111) menjadi detail yang lebih sederhana, namun tetap dengan nilai yang sama.

3) Revisi ke-3 KANWIL (13 Februari 2024)

Revisi Halaman III DIPA kewenangan Kanwil DJPb dengan penyesuaian nominal akun dan detail serta realisasi awal tahun pada bulan JanuariI. Perbaikan ini dilakukan berhubungan

dengan pembukaan revisi Kanwil untuk perbaikan dan perubahan target pada Triwulan I.

4) Revisi ke-4 POK (15 Maret 2024) :

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perubahan detail pada kegiatan Jenis yang dilestarikan (REB.001) dan penyesuaian detail rencana barang yang akan diadakan untuk memenuhi belanja Modal (053) pada Kegiatan Pemenuhan Sarpras Kegiatan Konservasi di Mahakam Hulu.

5) Revisi ke-5 KANWIL (22 April 2024)

Revisi Halaman III DIPA Kewenangan Kanwil dalam rangka penyesuaian realisasi pada Triwulan I dan penyusunan target pada Triwulan II, selain itu perubahan detail juga dilakukan pada operasional Gaji dan Perkantoran berupa pergeseran belanja Tukin dan penyesuaian realisasi pembayaran Gaji ke-14 (THR).

6) Revisi ke-6 POK (29 April 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perubahan detail berupa nominal detail dan akun pada kegiatan Kerjasama dan Kemitraan serta Kegiatan Survey Penyediaan Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan, selain itu perbaikan detail belanja modal juga ikut dilakukan.

7) Revisi ke-7 KANWIL (3 Juni 2024)

Revisi Halaman III Kewenangan Kanwil dalam rangka perbaikan nilai rencana realisasi pembayaran Gaji ke-13 dan 14 yang dilakukan pada bulan Desember. Revisi ini dibuka oleh Kanwil DJPb mengingat ketentuan peraturan

terkait formulasi baru penilaian IKPA baru diberlakukan pada Triwulan II TA 2024, sehingga seluruh satker diberi kesempatan untuk memperbaiki halaman III yang dimiliki.

8) Revisi ke-8 DJA (11 Juni 2024)

Revisi Kewenangan DJA dalam rangka buka blokir yang terdapat dalam DIPA BPSPL Pontianak, besar DIPA terblokir sebesar Rp. 350.000.000 yang terdapat dalam satu Rincian Ouput (RO) Pemberdayaan Masyarakat dalam KRO Kegiatan Konservasi. Pelepasan blokir ini diikuti dengan pembuatan KRO baru yang akan menampung nilai pelepasan blokir tersebut (KRO SCC Peningkatan Kapasitas Masyarakat).

9) Revisi ke-9 POK (8 Juli 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perbaikan detail belanja pada berbagai kegiatan seperti Kegiatan Respon Cepat, Gerakan Bersih Laut dan Pantai (GBPL), kegiatan Monitoring Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut hingga Operasional Perkantoran. Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan nilai detail terhadap kesesuaian hasil realisasi pada periode bulan sebelumnya.

10) Revisi ke-10 KANWIL (12 Juli 2024)

Revisi Revisi Halaman III Kewenangan Kanwil dalam rangka perbaikan realisasi pada Triwulan II dan penyesuaian target Triwulan III. Dalam triwulan III diperbaharui target menjadi 68.63% (Juli 54,38%; Agustus 61,54%; dan Desember

68,63%). Adapun realisasi hingga bulan Juni memperlihatkan besar realisasi sebesar 44.52%

11) Revisi ke-11 POK (3 Agustus 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perbaikan detail akun (minus belanja) di beberapa kegiatan teknis yang telah dilaksanakan, antara lain dalam Kegiatan Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/ Terancam Puna, Bulan Cinta Laut, Operasional Perkantoran dan Layanan Sarana Internal. POK ini juga mengubah satu jenis akun yang belum memiliki realisasi menjadi Akun Perjalanan Dinas Luar Negeri pada kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut.

12) Revisi ke-12 POK (20 September 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perbaikan detail akun (minus belanja) di beberapa kegiatan teknis yang telah dilaksanakan, antara lain dalam kegiatan bulan cinta laut, mata pencaharian alternatif, layanan hukum, rekomendasi pengelolaan konservasi, penyediaan data populasi Lola, operasional Kawasan Konservasi dan perubahan sub komponen kegiatan, pelayanan pemanfaatan jenis, sosialisasi KKPRL dan kegiatan monitoring/verifikasi, serta kegiatan layanan dukungan manajemen internal untuk operasional kantor.

13) Revisi ke-13 Kanwil (9 Oktober 2024)

Revisi Revisi Halaman III Kewenangan Kanwil dalam rangka perbaikan realisasi pada Triwulan III dan penyesuaian target Triwulan IV. Dalam triwulan IV diperbaharui target

menjadi 100% (Oktober 82,17%; November 94,00%; dan Oktober 100%). Adapun realisasi hingga bulan September memperlihatkan nilai sebesar 71,10% dari total pagu 18.594.183.000.

14) Revisi ke-14 Kanwil (28 Oktober 2024)

Revisi Kewenangan Kanwil dalam rangka pergeseran dan perbaikan nilai Gaji – Tunjangan Kinerja dari akun-akun komponen gaji yang masih ada. Selain itu juga terdapat optimalisasi sisa belanja 52 yang diubah menjadi belanja 53 tanpa mengurangi dan menambahkan volume kegiatan yang sudah ada. Revisi ini juga melakukan perubahan detail/POK baik dari KRO EBA, PBT, PBW, REA hingga REB.002.

15) Revisi ke-15 DJA (14 November 2024)

Revisi kewenangan DJA dalam rangka penambahan belanja 51 (Gaji) sebesar Rp. 410.512.000, revisi ini dilakukan untuk menyelesaikan potensi minus dari realisasi Gaji hingga akhir tahun di BPSPL Pontianak. Selain itu nilai revisi POK diluar dari belanja 51 tidak dapat dilakukan.

16) Revisi ke-16 Kanwil (20 November 2024)

Revisi Halaman IV (DIPA Blokir) sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 perihal Langkah – Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Adapun nilai Blokir yang harus dilakukan oleh BPSPL Pontianak adalah sebesar Rp. 180.154.000 yang tersebar kedalam beberapa KRO dengan komposisi besar blokir bersumber dari PNB

sebesar Rp. 56.018.000 dan dari RM sebesar Rp. 124.136.000.

17) Revisi ke-17 POK (29 November 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perbaikan detail akun (minus belanja) di beberapa kegiatan teknis yang telah dilaksanakan, antara lain optimalisasi akun dalam kegiatan Kawasan Konservasi (pemenuhan rencana kegiatan Makan Siang Gratis – Konservasi Goes to School), kegiatan fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi, kegiatan Bulan Cinta Laut, kegiatan perencanaan ruang laut, pelayanan pemanfaatan jenis dan dukungan manajemen internal.

18) Revisi ke-18 Kanwil (17 Desember 2024)

Revisi Kewenangan Kanwil dalam rangka revisi pagu minus belanja pegawai (51) yang berasal dari akun belanja gaji sendiri. Pergeseran antar detail dan akun dilakukan masih dalam satu komponen yang sama yaitu Gaji dan Tunjangan (001), Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak (A).

19) Revisi ke-19 POK (21 Desember 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perbaikan pagu minus (akun dan detail) dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL), peningkatan kapasitas masyarakat pemanfaat kawasan konservasi, Survey Arwana dan Operasional Pelayanan yang bersumber dari RM dan PNPB, Evika, Kawasan Konservasi yang

Operasional hingga Stock Center karang dan Respon Cepat.

20) Revisi ke-20 POK (25 Desember 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perbaikan pagu minus (akun dan detail) dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan Operasional Pelayanan yang bersumber dari RM dan PNBP dan Operasional Perkantoran yang baru akan dilaksanakan.

21) Revisi ke-21 POK (25 Desember 2024)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perbaikan pagu minus (akun dan detail) pada kegiatan Mata Pencanharian Alternatif dan Kawasan Konservasi Operasional. Revisi POK ini dilakukan tanpa menggeser jumlah anggaran dalam sub-komponen kegiatan, namun hanya perbaikan nilai minus detail dalam setiap akun.

22) Revisi ke-22 DIPA Pemutakhiran KPA (26 Desember 2024)

Revisi Pemutakhiran KPA dalam rangka memperbaharui data SPAN dengan data revisi POK terakhir, revisi ini tidak mengubah Rincian Penarikan Dana (RPD).

4. BPSPL Pontianak tahun 2024 menyelenggarakan PIPK dengan menetapkan 5 akun signifikan yaitu :

1) 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada kas di bendahara pengeluaran dilakukan pengumpulan dokumen pendukung yaitu surat terkait UP, SP2D, LPJ bulanan, SPBy, BA kas, rekening koran.

2) 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya

Pada pendapatan perizinan lainnya dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen terkait rekomendasi perijinan SAJI, data Simponi, LPJ bendahara penerimaan, laporan realisasi pendapatan.

3) 117124 Persediaan Peralatan dan Mesin di serahkan ke Masyarakat

Pada persediaan peralatan dan mesin di serahkan ke masyarakat dokumen seperti BAST, kontak, SPM. Bantuan diberikan kepada kelompok – kelompok berikut :

- Kelompok pekumpulan peduli mangrove surya perdana mandiri
- Pokmaswas penyu baro
- Pokwasmas pesut lestari

4) 132111 Peralatan dan Mesin

Pada peralatan dan mesin dokumen terkait dalam data dukung PIPK adalah dokumen terkait kontrak, kuitansi, BAST, Neraca dan Posisi BMN, SIMAN.

5) 117111 Barang Konsumsi

Pada barang konsumsi dokumen terkait dalam data dukung PIPK adalah dokumen terkait persediaan dalam kegiatan dan persediaan lainnya.

Penetapan akun signifikan sudah disampaikan ke unit Eselon I. Perkembangan PIPK BPSPL Pontianak untuk semester I tahun 2024 sudah penetapan tabel A. PIPK telah dilaksanakan dan di reviu dengan hasil Efektif.

5. Pada pagu BPSPL Pontianak terdapat Program Prioritas Nasional dengan penjelasan pagu dan

realisasi untuk periode s.d 31 Desember 2024 sesuai dokumen terlampir.

6. Pelaporan capaian output BPSPL Pontianak telah berlangsung sejak januari sd Desember 2024. Dengan detail capaian RO sesuai dokumen terlampir.